

Transformasi Bank Syariah : Peluang dan Tantangan Manajemen Bank Syariah pada masa Ibu Kota Nusantara

Dwi Danty Aisyah

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: dantyaisyah18@gmail.com

Kata Kunci:

Bank Syariah; peluang;
tantangan; ekonomi;
strategi

Keywords:

Islamic Banking;
opportunities; challenges;
economics; strategi.

ABSTRAK

Jakarta ditetapkan menjadi Ibu Kota mengacu pada UU Nomor 29 tahun 2007 telah menarik perhatian publik terkait rencana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Nusantara. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak pemindahan ibu kota terhadap bank syariah, dengan fokus pada peluang dan tantangan yang dihadapi selama masa transisi. Pendekatan penelitian ini menggunakan analisis dari berbagai entitas seperti BPS atau Bank Islam Internasional. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa bank syariah perlu memperhatikan faktor internal dan eksternal, serta aspek geografi

dalam mengelola risiko dan tantangan ekonomi yang muncul. Tantangan utama meliputi jarak yang semakin jauh, pembengkakan APBN, dan kenaikan pajak. Di sisi lain, terdapat peluang seperti kebijakan pembiayaan pembangunan, visi Superhub Ekonomi IKN, dan kerja sama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara. Dengan populasi yang besar, bank syariah memiliki potensi untuk berkembang di Ibu Kota Nusantara. Kesimpulannya, pemindahan Ibu Kota menciptakan dinamika baru bagi perbankan syariah, dengan tantangan yang perlu diatasi dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan industri perbankan syariah di masa depan.

ABSTRACT

Jakarta's establishment as the capital city under Law Number 29 of 2007, has drawn public scrutiny towards the project of transferring the capital to East Kalimantan, termed the Nusantara Capital. This research focused on the opportunities and challenges that Islamic banks would face during the transition period. This investigation approach employs analysis from diverse entities including the research agency of Statistics or the Islamic Development Bank (IsDB). The outcomes of the descriptive study indicate that Islamic financial institutions must be mindful of both internal and external elements, along with geographical considerations, to effectively handle the economic uncertainties and obstacles encountered. The main challenges include increasing distance, state budget overruns, and tax increases. On the other hand, there are opportunities such as development financing policies, the vision of the IKN Economic Superhub, and cooperation with the Nusantara Capital Authority. With its vast populace, Islamic banking institutions have the opportunity for advancement in the Archipelago's Principal City. In conclusion, the relocation of the capital city creates new dynamics for Islamic banking. With challenges to address and opportunities to seize, the future growth of the Islamic banking industry presents both hurdles and prospects.

Pendahuluan

Jakarta ditetapkan sebagai pusat pemerintahan dan Ibu Kota mengacu kepada Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rencana pemindahan Ibu Kota Jakarta semakin menarik perhatian publik sejak masa reformasi.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Jakarta terlalu berat menanggung beban berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan juga pusat perekonomian. Jutaan orang datang dari berbagai daerah untuk mengadu nasib di Ibu Kota akibatnya Jakarta yang seharusnya ditargetkan hanya untuk 600.000 jiwa pada masa kolonial, kini ditempati lebih dari 10 juta penduduk. Berdasarkan data World Bank, kemacetan lalu lintas di Jakarta menyebabkan kerugian ekonomi sebesar Rp. 65 triliun/tahun. Tak heran jika permasalahan sosial, semakin lekat dengan Jakarta terutama yaitu jumlah pengangguran, garis kemiskinan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pemindahan Ibu Kota sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 1957 ketika masa kepemimpinan presiden Soekarno namun terus mengalami penundaan sampai pada 6 agustus 2019 saat rapat paripurna DPR, Presiden Joko Widodo memohon izin kepada anggota parlemen, sesepuh, tokoh bangsa, terutama kepada semua masyarakat Indonesia untuk memindahkan Ibu Kota negara ke wilayah Kalimantan yang kini dikenal sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN). Lebih tepatnya di tanah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di bagian timur Kalimantan. Pemilihan kriteria Kalimantan Timur untuk Ibu Kota yang baru antara lain letak geografi strategis, kedekatan dua kota besar yakni Balikpapan dan Samarinda, peningkatan ekonomi, struktur demografi yang beragam, potensi konfliknya rendah, dukungan sistem pertahanan darat, laut, dan udara juga kelengkapan infrastruktur. Masa proyeksi pembangunan IKN dimulai pada tahun 2022 dan masa perencanaan jangka panjang IKN direncanakan hingga tahun 2045.

Kebijakan untuk relokasi IKN dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengembangkan kawasan ekonomi baru, menurunkan kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat diluar pulau Jawa khususnya wilayah Indonesia timur.

Tabel 1. Berikut ini tabel persebaran penduduk Indonesia pada tahun 2021 s/d 2045.

Wilayah	Presentase persebaran jumlah penduduk secara nasional (%)	Kontribusi Ekonomi untuk nasional (%)
Jawa	57%	59%
Sumatera	22%	21,31%
Kalimantan	6%	8,05%
Sulawesi	7,4%	6,33%
Bali, Nusa Tenggara	5,6%	3,06%
Maluku, Papua	2,8%	2,24%

Sumber: Persebaran Penduduk Indonesia 2015-2045 Hasil Supas 2015 (tahun 2019) dan Badan Pusat Statistik (Feb 2020)

Tabel diatas menunjukkan kesenjangan ekonomi yang tidak merata. Jika membiarkan pertumbuhan ekonomi lebih banyak di pulau Jawa saja, maka akan terjadi perubahan pertumbuhan ekonomi regional. Akibat dari adanya perbedaan

pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan ketimpangan antar wilayah regional semakin meningkat.

Kebijakan relokasi Pembangunan IKN juga sekaligus tanggap terhadap potensi perekonomian di Jakarta. Salah satu sektor utama dalam dunia perekonomian adalah perbankan. Saat ini sektor perbankan syariah di Indonesia sedang berkembang sangat pesat dan berperan penting dalam mendorong kegiatan perekonomian. Berkaitan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat lebih lanjut mengenai perekonomian akan terjadi pada proyek relokasi IKN dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan serta meninjau peluang dan tantangan dari risiko yang dihadapi dunia perbankan khususnya perbankan syariah saat masa pemindahan IKN dengan penjelasan lebih lanjut dalam penelitian ini.

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dampak pemindahan Ibukota Jakarta ke Kalimantan Timur terhadap industri perbankan syariah.
2. Meneliti peluang dan tantangan dari risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah selama masa transisi pemindahan Ibu Kota.
3. Mengidentifikasi strategi manajemen risiko yang dapat digunakan oleh bank syariah untuk mengatasi tantangan dan menggunakan peluang yang timbul selama proses pemindahan Ibu Kota.
4. Mengevaluasi peran bank syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi dan keuangan di Ibu Kota Nusantara.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat mencakup beberapa hal, antara lain:

1. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak pemindahan Ibu Kota Jakarta ke Kalimantan Timur terhadap industri perbankan syariah.
2. Menyediakan wawasan tentang peluang dan tantangan dari risiko yang dihadapi oleh bank syariah selama masa transisi pemindahan Ibu Kota.
3. Memberikan panduan bagi bank syariah dalam mengidentifikasi strategi manajemen risiko untuk mengatasi tantangan dan menggunakan peluang yang muncul selama proses pemindahan Ibu Kota.
4. Mendorong pengembangan kebijakan yang mendukung perkembangan industri perbankan syariah Ibu Kota Nusantara.
5. Menyumbang pada literatur dan pengetahuan tentang peran bank syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi dan keuangan di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi literatur dari Scholar, iPUSNAS, dan Repository yang menjadi referensi penelitian. Penulis juga mendapatkan data sekunder yang diperoleh dari banyak sumber Lembaga Keuangan dan Data Penduduk antara lain Badan

Pusat Statistik(BPS), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan *Islamic Development Bank(IsDB)*. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif berbentuk tinjauan peluang dan tantangan manajemen perbankan syariah dengan melakukan analisis terhadap progress rencana proyek pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur. Adapun penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, penjelasan, dan juga memvalidasi mengenai peluang dan tantangan perbankan syariah dalam mempertahankan reputasinya di Ibu Kota Nusantara.

Pembahasan

Perbankan syariah adalah salah satu institusi keuangan yang memposisikan diri sebagai pelaku aktif dalam mendukung kegiatan investasi di masyarakat. Di satu sisi bank syariah aktif berinvestasi di masyarakat, sedangkan sisi lain bank syariah mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam berinvestasi di berbagai produknya(Wardana & Abdani, 2023). Dalam perekonomian Indonesia, perbankan memiliki peran vital sebagai indikator stabilitas ekonomi negara. Terpuruknya perbankan di suatu negara dapat menimbulkan krisis dan mengganggu stabilitas perekonomian di negara tersebut. Namun hal ini tidak berdampak pada bank syariah. Ketika krisis global pada tahun 2008, bank syariah menunjukkan bertahan lebih baik jika dibandingkan bank konvensional. Oleh karena itu, kesehatan keuangan menjadi salah satu kriteria penting dan dapat digunakan dalam mengevaluasi kinerja aktivitas perbankan secara keseluruhan dan efisiensi perbankan.

Tantangan Perbankan Syariah

Kinerja keuangan syariah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, tetapi juga harus melihat dari aspek geografi dalam menghadapi sebuah masalah. Masyarakat khawatir terhadap proyek mega IKN adalah menjadi sumber utama karena berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi pada sektor perbankan dengan jarak yang semakin jauh, pembengkakan APBN, dan kenaikan pajak. Sebab, pada sektor keuangan seperti perbankan syariah harus proaktif menjadi model terbaik dalam proses mitigasi risiko dan tantangan ekonomi yang dimanis, jika bank tidak bisa atau terlalu lama dalam menyesuaikan kondisi maka akan berdampak terhadap peningkatan risiko operasional. Perbankan syariah dituntut memiliki sumber daya manusia yang profesional, berkualitas, berkompeten dalam bertugas. Perbankan Syariah penting untuk melakukan edukasi dan kampanye tentang perbedaan perbankan syariah dan perbankan konvensional kepada masyarakat. Perbankan syariah butuh melakukan perluasan kembali kantor-kantor cabang di wilayah baru Kalimantan Timur(Setiawan & Mugiyati, 2023). Perbankan syariah menjamin perlindungan penyediaan informasi prioritas agar meminimalisir kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah. Risiko-risiko tersebut dapat menimbulkan banyak kerugian seperti kerugian finansial, reputasi, atau bahkan kegagalan dalam memenuhi kewajiban regulasi(Budianto, 2023). Semua ini juga bisa berdampak ke sektor-sektor lain.

Dalam upaya pengelolaan risiko, Bank Syariah perlu melakukan pengawasan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap risiko dapat diterima dan dikelola

dengan efektif. Hal ini meliputi memastikan keamanan sistem teknologi informasi, sistem rotasi yang memungkinkan karyawan memperluas pengetahuannya mengenai regulasi peraturan dan standar operasional yang berlaku, implementasi prosedur terbaru, serta Bank Syariah juga wajib memenuhi penerapan prinsip syariah yang dilaksanakan secara menyeluruh dan konsisten. Dalam pengelolaan usahanya, bank syariah harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim dalam melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh, termasuk dalam hal pembiayaan. Kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah dilandasi oleh penerapan prinsip-prinsip Islam yang tertuang dalam aturan operasional lembaga keuangan, sehingga pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah dapat mengakibatkan sanksi administratif terhadap pihak-pihak yang tidak mematuhi prinsip-prinsip syariah atau menghalanginya implementasinya (Ihyak & Suprayitno, 2023). Adanya berbagai macam risiko menjadi tantangan dan ancaman tersendiri bagi Manajemen Perbankan Syariah.

Peluang Perbankan Syariah

Sebagaimana tantangan yang terjadi diatas akan tetapi di sisi yang lain ada peluang menjanjikan bagi perbankan syariah pada di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Diantaranya :

1. Terdapat juga kebijakan Surat Berharga Syariah Negara yang ikut mendukung pembiayaan pembangunan di IKN.
2. Visi Superhub Ekonomi IKN akan diwujudkan melalui pengembangan enam klaster ekonomi berorientasi teknologi dan berkelanjutan berfungsi sebagai penggerak utama perekonomian. Ini menjadi ladang emas bagi perbankan syariah dalam pembiayaan dan investasi (Saraswati & Adi, 2022).
3. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kantor Pusat BSI. Kerja sama dengan Otorita IKN adalah langkah strategis bagi BSI untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di Indonesia sekaligus mempertahankan dan mengembangkan identitas keuangan dan perbankan syariah Indonesia secara global (Biro SDM dan Humas Otorita Ibu Kota Nusantara, 2024). Dengan populasi mencapai 800 ribu orang, Ibu Kota Nusantara membuka potensi besar bagi BSI untuk menyediakan layanan perbankan syariah.

Kesimpulan

Perpindahan Ibukota semula di Jakarta ke Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Nusantara menciptakan tantangan dan peluang bagi industri perbankan syariah. Bank syariah perlu memperhatikan faktor internal dan eksternal, serta aspek geografi dalam mengelola risiko dan tantangan ekonomi yang muncul selama masa transisi. Tantangan utama meliputi jarak yang semakin jauh, pembengkakan APBN, dan kenaikan pajak. Namun, terdapat peluang seperti kebijakan pembiayaan pembangunan, visi Superhub Ekonomi IKN, dan kerja sama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara. Dengan populasi yang besar, bank syariah memiliki potensi untuk berkembang di Ibu Kota Nusantara. Sebab

itu, perpindahan Ibu Kota menciptakan dinamika baru bagi perbankan syariah, dengan tantangan yang perlu diatasi dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan industri perbankan syariah di masa depan.

Daftar Pustaka

- Biro SDM dan Humas Otorita Ibu Kota Nusantara. (2024). *SIARAN PERS Otorita Ibu Kota Nusantara*. Humas Otorita Ibu Kota Nusantara. <https://ikn.go.id/storage/press-release/2024/>
- Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan penelitian risiko operasional pada industri keuangan syariah dan konvensional: Studi bibliometrik vosviewer dan literature review. *Ekonomi Islam*, 14(2), 158–174. <https://doi.org/10.22236/jei.v14i2.11121>
- Ihyak, M., & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Institute of Computer Science (IOCS)*, 2087–6327(2). www.enrichment.iocspublisher.org
- Saraswati, M. K., & Adi, E. A. W. (2022). Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis SWOT. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(2). <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3086>
- Setiawan, J. A., & Mugiyati, M. (2023). Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia Dalam Mempertahankan Eksistensi di Era Digital. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 834–845. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.2396>
- Wardana, G. K., & Abdani, F. (2023). Bukti efisiensi bank syariah di Indonesia dan Malaysia: ROA, BANK SIZE dan NPF. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia*, 17(1), 30–41. <https://doi.org/10.32815/jibeka.v17i1.1026>